



LAPORAN KEUANGAN



TAHUN ANGGARAN

2024

unaudited

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

013.01.0400.409181

KATA PENGANTAR



AGUNG REKTONO SETO

KEPALA KANTOR WILAYAH

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Unaudited*) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Unaudited*) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
A. PENJELASAN UMUM	8
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta	8
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3. Basis Akuntansi	10
A.4. Dasar Pengukuran	10
A.5. Kebijakan Akuntansi	11
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	20
B.1. Pendapatan	22
B.2. Belanja	24
B.2.1. Belanja Pegawai	26
B.2.2. Belanja Barang	30
B.2.3. Belanja Modal	35
B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36
B.2.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	39
C.1. Aset Lancar	39
C.1.1. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	39
C.1.2. Persediaan	39
C.2. Aset Tetap	41
C.2.1. Tanah	41
C.2.2. Peralatan dan Mesin	42
C.2.3. Gedung dan Bangunan	47
C.2.4. Aset Tetap Lainnya	47
C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	48
C.3. Aset Lainnya	48
C.3.1. Aset Tak Berwujud	49
C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	49
C.3.3. Aset Lain-lain	50
C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	50

C.4. Kewajiban Jangka Pendek	51
C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga	51
C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka	52
C.5. Ekuitas	52
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	54
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	54
D.2. Beban Pegawai	55
D.3. Beban Persediaan	57
D.4. Beban Barang dan Jasa	58
D.5. Beban Pemeliharaan	60
D.6. Beban Perjalanan Dinas	62
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	63
D.8. Kegiatan Non Operasional	64
D.8.1. Pendapatan Pengelepasan Aset	64
D.8.2. Beban Pelepasan Aset	64
D.8.3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	65
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	68
E.1. Ekuitas Awal	68
E.2. Surplus (Defisit) LO	68
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	68
E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	68
E.4. Transaksi Antar Entitas	69
E.5. Ekuitas Akhir	71
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	73
F.1. Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan HAM	73
F.2. Pengungkapan Lain-lain	73

		Hal
Tabel 1	Perhitungan Penyisihan Piutang	13
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	17
Tabel 4	Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024	21
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024	22
Tabel 6	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023	23
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	23
Tabel 8	Perbandingan Rincian Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	23
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	24
Tabel 10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	25
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	26
Tabel 12	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2024	27
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	28
Tabel 14	Perbandingan Rincian Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	29
Tabel 15	Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	30
Tabel 16	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2024	31
Tabel 17	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2024	31
Tabel 18	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2024	32
Tabel 19	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2024	32
Tabel 20	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa per 31 Desember 2024	32
Tabel 21	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024	33
Tabel 22	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2024	33
Tabel 23	Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	34

Tabel 24	Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	35
Tabel 25	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal per 31 Desember 2024	35
Tabel 26	Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	36
Tabel 27	Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin	36
Tabel 28	Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	37
Tabel 29	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2024 dan TA 2023	39
Tabel 30	Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	40
Tabel 31	Rincian Persediaan Barang Konsumsi	40
Tabel 32	Rincian Bahan untuk Pemeliharaan	41
Tabel 33	Rincian Mutasi Tanah	42
Tabel 34	Rincian Saldo Tanah	42
Tabel 35	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	43
Tabel 36	Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin	43
Tabel 37	Rincian Transfer Masuk Peralatan dan Mesin	44
Tabel 38	Rincian Batal Transfer Keluar Peralatan dan Mesin	44
Tabel 39	Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin	45
Tabel 40	Rincian Koreksi Susulan Peralatan dan Mesin	45
Tabel 41	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin	46
Tabel 42	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	47
Tabel 43	Rincian Aset Tetap Lainnya	47
Tabel 44	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	48
Tabel 45	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud	49
Tabel 46	Rincian Aset Tak Berwujud	49
Tabel 47	Rincian Mutasi Aset Lain-lain	50
Tabel 48	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	51
Tabel 49	Rincian Saldo Utang Pihak Ketiga Lainnya	52
Tabel 50	Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka TA 2024 dan TA 2023	52
Tabel 51	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO TA 2024 dan TA 2023	54
Tabel 52	Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA TA 2024	54
Tabel 53	Rincian selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	55
Tabel 54	Rincian Perbandingan Beban Pegawai-LO TA 2024 dan TA 2023	56
Tabel 55	Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA untuk TA 2024	57
Tabel 56	Perbandingan Beban Persediaan-LO TA 2024 dan TA 2023	57
Tabel 57	Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA TA 2024	57
Tabel 58	Penghitungan Selisih Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA TA 2024	58

Tabel 59	Perbandingan Beban Barang dan Jasa –LO TA 2024 dan TA 2023	59
Tabel 60	Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA TA 2024	59
Tabel 61	Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa -LO dengan Belanja Barang-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	60
Tabel 62	Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023	61
Tabel 63	Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA TA 2024	61
Tabel 64	Perhitungan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan–LRA TA 2024	62
Tabel 65	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2024 dan TA 2023	62
Tabel 66	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA TA 2024 dan TA 2023	63
Tabel 67	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO TA 2024 dan TA 2023	63
Tabel 68	Perbandingan Pendapatan Pengelepasan Aset -LO TA 2024 dan TA 2023	64
Tabel 69	Perbandingan Beban Pengelepasan Aset Non Lancar-LO TA 2024 dan TA 2024	65
Tabel 70	Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO TA 2024 dan TA 2023	66
Tabel 71	Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan Lain-Lain -LRA TA 2024	64
Tabel 72	Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi TA 2024	68
Tabel 73	Perhitungan Transaksi Antar Entitas-LPE TA 2024 dan TA 2023	69
Tabel 74	Rincian Transfer Masuk TA 2024	70
Tabel 75	Rincian Transfer Keluar TA 2024	71
Tabel 76	Rincian Capain Output TA 2024	74

	Hal
Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	25



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta 55171
Telepon : (0274) 378431, Faksimile : (0274) 374081
Laman : <https://jogja.kemenkum.go.id/>, Surel : kanwiljogja@kemenkum.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001



RINGKASAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp81.513.637,00 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp26.788.548.527,00 atau mencapai 99,73 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp26.868.934.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp75.439.393.932,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp85.389.459,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp75.255.395.108,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp98.609.365,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp133.791.278,00 dan Rp75.305.602.654,00.



3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp55.481.519,00; sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp27.847.576.190,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp27.792.094.671,00. Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp4.414.775,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp27.787.679.896,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp75.351.177.281,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp27.787.679.896,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp27.744.535.251,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp75.305.302.654,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 (*Unaudited*) disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tahun 2024		% thd Angg	Tahun 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	81.513.637	0,00	71.901.673
JUMLAH PENDAPATAN		-	81.513.637	0,00	71.901.673
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	17.471.565.000	17.446.205.777	99,85	15.710.311.200
Belanja Barang	B.2.2	8.862.369.000	8.807.342.750	99,38	7.903.582.874
Jumlah Belanja Operasi		26.333.934.000	26.253.548.527	99,69	23.613.894.074
Belanja Modal	B2.3				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B2.3.1	535.000.000	535.000.000	100,00	362.340.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B2.3.2	-	-	0,00	1.703.180.984
Jumlah Belanja Modal		535.000.000	535.000.000	100,00	2.065.520.984
JUMLAH BELANJA		26.868.934.000	26.788.548.527	99,70	25.679.415.058



II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.1	11.246.820	-
Persediaan	C.1.2	74.142.639	135.913.013
Jumlah Aset Lancar		85.389.459	135.913.013
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	61.765.207.000	61.765.207.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	17.682.179.928	17.271.356.613
Gedung dan Bangunan	C.2.3	13.517.329.612	13.517.329.612
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	284.440.580	396.540.580
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5	(17.993.762.012)	(17.707.233.587)
Jumlah Aset Tetap		75.255.395.108	75.243.200.218
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	1.732.938.000	1.732.938.000
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	94.234.365	
Aset Lain-Lain	C.3.3	577.951.511	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	(2.306.514.511)	(1.719.813.000)
Jumlah Aset Lainnya		98.609.365	13.125.000
JUMLAH ASET		75.439.393.932	75.392.238.231
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	133.791.278	39.020.113
Pendapatan Diterima di Muka	C.4.2	-	2.040.837
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		133.791.278	41.060.950
JUMLAH KEWAJIBAN		133.791.278	41.060.950
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	75.305.602.654	75.351.177.281
Ekuitas		75.305.602.654	75.351.177.281
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		75.439.393.932	75.392.238.231



III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	55.481.519	56.156.158
JUMLAH PENDAPATAN		55.481.519	56.156.158
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	17.446.205.777	15.706.993.117
Beban Persediaan	D.3	147.188.202	206.895.879
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.242.491.456	4.265.806.563
Beban Pemeliharaan	D.5	1.428.671.972	1.463.804.048
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.051.298.294	1.911.945.710
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.531.720.489	2.614.667.878
JUMLAH BEBAN		27.847.576.190	26.170.113.195
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(27.792.094.671)	(26.113.957.037)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Pendapatan Pengelepasan Aset	D.8.1	34.078.075	28.825.100
Beban Pengelepasan Aset	D.8.2	34.905.000	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.3	5.241.700	187.041
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4.414.775	29.012.141
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(27.787.679.896)	(26.084.944.896)
POS LUAR BIASA	D.9		
SURPLUS/DEFISIT LO		(27.787.679.896)	(26.084.944.896)



IV. LAPORAN PERUBAHAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	75.351.177.281	73.895.870.456
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(27.787.679.896)	(26.084.944.896)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.1	(2.429.982)	1.319.288.420
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	27.744.535.251	26.220.963.301
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(45.574.627)	1.455.306.825
EKUITAS AKHIR	E.5	75.305.602.654	75.351.177.281

PENDAHULUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN





V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Entitas berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.



Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen dengan visi ***“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”*** dan misi:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Pada Tahun Anggaran 2015 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan Restrukturisasi Program dan Kegiatan (RPK). RPK merupakan implementasi dari upaya penataan kembali Program dan Kegiatan sebagaimana rekomendasi dari Surat Edaran Bersama Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor:0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.

Penataan kembali Program dan Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan kepada seluruh Unit Eselon I selaku pemangku Program untuk dapat memiliki Satuan Kerja di tingkat Wilayah *in line* secara penganggaran. Salah satu dampaknya adalah setiap Unit Eselon I memiliki Satuan Kerja di tingkat Wilayah berupa satker Kantor Wilayah.

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.



Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:



- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.



- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.



*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun



d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan diadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:



Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Pate Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.



b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN





B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode satuan kerja 409181 selama Tahun Anggaran 2024 melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak enam belas kali yaitu:

- 1) Revisi DIPA pertama dalam rangka Perubahan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) dan Pemutakhiran data POK;
- 2) Revisi DIPA kedua terkait penyesuaian belanja barang operasional dan Perubahan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA);
- 3) Revisi DIPA ketiga terkait Perubahan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) dan Pemutakhiran data POK;
- 4) Revisi DIPA keempat dalam rangka perubahan Rencana Penarikan Dana p(Halaman III DIPA) dan Pemutakhiran data POK dan pergeseran Anggaran Antar KRO dalam Satu Program Satu Kegiatan Satu Satker;
- 5) Revisi DIPA Kelima dalam rangka perubahan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) dan Pemutakhiran data POK
- 6) Revisi DIPA Keenam terkait perubahan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA), pergeseran anggaran antar Satuan Kerja, antar Unit Eselon I dalam 1 (satu) program anggaran;
- 7) Revisi DIPA Ketujuh terkait Perubahan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) dan Pemutakhiran Data POK;
- 8) Revisi DIPA Kedelapan terkait perubahan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) dan pemutakhiran data POK;
- 9) Revisi DIPA Kesembilan terkait Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) dan pemutakhiran data POK, pergeseran anggaran antar KRO;
- 10) Revisi DIPA Kesepuluh terkait penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) CPNS;
- 11) Revisi DIPA Kesebelas terkait Perubahan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) dan Pemutakhiran Data POK;



- 12) Revisi DIPA Keduabelas terkait pemenuhan belanja operasional, penyelesaian pagu minus belanja pegawai operasional, pergeseran anggaran dari belanja oprasional ke belanja nonoperasional, penyeseaian tunggakan, pergeseran anggaran antar jenis belanja, pergeseran belanja antar unit eselon I, pencantuman penghapusan perubahan catatan halaman IVb, perubahan RPD, perubahan pejabat penandatanganan DIPA;
- 13) Revisi DIPA Ketigabelas terkait pemenuhan belanja operasional, pergeseran anggaran antar jenis belanja, pergeseran atar KRO, RPD, pemutakhiran POK;
- 14) Revisi DIPA Keempatbelas terkait pemutakhiran POK dan halaman III DIPA;
- 15) Revisi DIPA Kelimabelas terkait pemenuhan belanja operasional, pergeseran anggaran antar satker, pergeseran atar KRO, pemanfaatan sisa anggaran kontraktual,
- 16) Revisi DIPA Keenambelas terkait pemutakhiran POK dan halaman III DIPA.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 4
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	Rp -	Rp -
Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp -
Jumlah Pendapatan	Rp -	Rp -
Belanja		
Belanja Pegawai	Rp 15.463.117.000	Rp 17.471.565.000
Belanja Barang	Rp 7.489.589.000	Rp 8.862.369.000
Belanja Modal	Rp 535.000.000	Rp 535.000.000
Jumlah Belanja	Rp 23.487.706.000	Rp 26.868.934.000



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Anggaran belanja mengalami kenaikan dari anggaran belanja awal sebesar Rp3.098.762.000,- dengan rincian:

- 1) penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp2.113.448.000,00 ditujukan untuk ABT gaji PNS dan P3K;
- 2) penambahan anggaran belanja barang sebesar Rp100.000.000,- ditujukan untuk jamuan tamu;
- 3) penambahan anggaran belanja barang sebesar Rp885.314.000,- ditujukan untuk pengadaan CPNS TA 2024.
- 4) penambahan anggaran belanja barang sebesar Rp282.466.000,- ditujukan untuk pengadaan CPNS TA 2024 dan jamuan tamu.

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp81.513.637,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp81.513.637,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024

	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Angg.
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengeloaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	-	76.271.937	0,00%
4259	PendapatanLain-lain	-	5.241.700	0,00%
Jumlah		-	81.513.637	0,00%



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Estimasi dan realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023

	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Angg.
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengeloan BMN, dan Iuran Badan Usaha	-	71.714.632	0,00%
4259	Pendapatan Lain-lain	-	187.041	0,00%
Jumlah		-	71.901.673	0,00%

Berikut adalah perbandingan Realisasi PNB Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan/Penurunan	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
81.513.637	71.901.673	9.611.964	13,37%

Perbandingan Rincian Realisasi PNB Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8
Perbandingan Rincian Realisasi Pendapatan
TA 2024 dan TA 2023

AKUN	URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN)	NAIK (TURUN) %
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	2.500.000	-	2.500.000	100,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	31.578.075	28.825.100	2.752.975	8,72
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	42.193.862	42.889.532	(695.670)	-1,65
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5.241.700	187.041	5.054.659	2702,43
Jumlah		81.513.637	71.901.673	9.611.964	13,37



Berdasarkan Tabel 8, realisasi PNBP Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi sebesar Rp9.611.964,00 atau 13,37% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2024:

- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp2.500.000,00 berupa penjualan bongkaran hasil rehab rumah dinas, rumah negara, dan gedung bangunan;
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp31.578.075,00 berupa pendapatan atas penjualan 1 (satu) paket peralatan mesin inventaris kantor;
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp42.193.862,00 berupa pendapatan sewa rumah dinas senilai Rp35.541.862,00 dan sewa kamar wisma tamu senilai Rp6.652.000,00;
- Pendapatan lain-lain berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp5.241.700,00 berupa Setoran Penerimaan Kelebihan Pembayaran Uang Makan Bulan Desember 2023 pegawai sejumlah 53 orang senilai Rp4,421,700,- dan setoran pengembalian tunjangan fungsional dari tahun 2021 sampai 2023 senilai Rp820,000,-.

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp26.788.548.527,
00.*

Realisasi Belanja (netto) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp25.679.415.058,00 atau 99,57% dari anggaran belanja sebesar Rp25.790.951.000,00.

Realisasi Belanja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp26.788.548.527,00 atau 99,70% dari anggaran belanja sebesar Rp26.868.934.000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Negara
TA 2024 dan TA 2023

Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan/Penurunan	
		(Rp)	%
26.788.548.527	25.679.415.058	1.109.133.469	4,32%



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

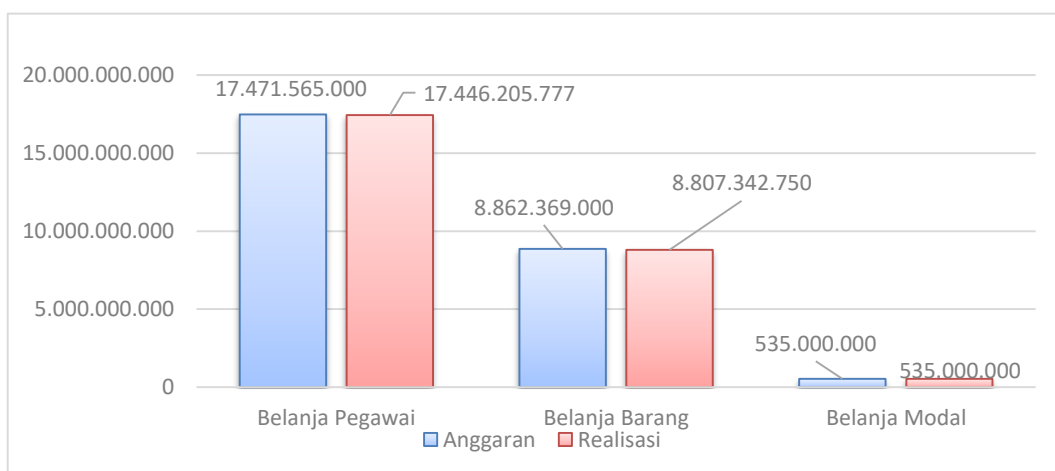
Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi sebesar Rp1.109.133.469,00 atau sebesar 4,32% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Berikut adalah Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 menurut jenis belanja:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	17.471.565.000	17.446.205.777	99,85
Belanja Barang	8.862.369.000	8.807.342.750	99,38
Belanja Modal	535.000.000	535.000.000	100,00
Total Belanja Kotor	26.868.934.000	26.788.548.527	99,70
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Total Belanja	26.868.934.000	26.788.548.527	99,70

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja





Perbandingan Realisasi Belanja untuk Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	17.446.205.777	15.710.311.200	11,05
Belanja Barang	8.807.342.750	7.903.582.874	11,43
Belanja Modal	535.000.000	2.065.520.984	(74,10)
Jumlah	26.788.548.527	25.679.415.058	4,32

Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,32% dengan rincian belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 11,05%, belanja barang mengalami kenaikan sebesar 11,43%, dan belanja modal mengalami penurunan sebesar 74,10%. Hal ini disebabkan seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja pelaksanaan anggaran.

B.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp17.446.205.777,
00

Realisasi Belanja Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Uang Makan, dan Belanja Lembur.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp17.446.205.777,00 atau 99,85% dari pagu sebesar Rp17.471.565.000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp15.710.311.200,00 atau 99,37% dari pagu sebesar Rp15.809.633.000,00. .



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut adalah Tabel Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 menurut jenis belanja pegawai:

Tabel 12
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2024

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11.715.584.000	11.715.582.500	-	11.715.582.500	100,00
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	178.000	175.117	4.479	170.638	95,86
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	882.732.000	882.730.460	-	882.730.460	100,00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	288.328.000	288.326.452	-	288.326.452	100,00
511123	Belanja Tunj Struktural PNS	431.820.000	431.790.000	2.634.808	429.155.192	99,38
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.029.002.000	1.029.002.000	2.160.000	1.026.842.000	99,79
511125	Belanja Tunj.PPh PNS	142.421.000	142.336.403	-	142.336.403	99,94
511126	Belanja Tunj. Beras	651.636.000	651.635.160	-	651.635.160	100,00
511129	Belanja Uang Makan	1.361.553.000	1.349.641.000	1.930.100	1.347.710.900	98,98
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	249.640.000	249.485.000	-	249.485.000	99,94
511611	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	352.893.000	352.892.000	-	352.892.000	100,00
511619	Belanja Pembulatan Gaji Pokok PPPK	6.000	4.662	-	4.662	77,70
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	20.995.000	20.931.070	-	20.931.070	99,70
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.816.000	3.814.800	-	3.814.800	99,97
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	31.950.000	31.950.000	-	31.950.000	100,00
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17.257.000	17.163.540	-	17.163.540	99,46
511628	Belanja Uang Makan PPPK	91.814.000	87.140.000	-	87.140.000	94,91
512211	Belanja Uang Lembur	199.940.000	198.335.000	-	198.335.000	99,20
	JUMLAH	17.471.565.000	17.452.935.164	6.729.387	17.446.205.777	99,85



Perbandingan Realisas Belanja Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2024 dan TA 2023

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
17.446.205.777	15.710.311.200	1.735.894.577	11,05%

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi sebesar Rp1.735.894.577,00 atau sebesar 11,05% dibandingkan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terjadi antara lain karena adanya kenaikan jumlah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta melalui mutasi pegawai dan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sehingga menyebabkan kenaikan realisasi gaji, gaji ke-13 dan gaji ke-14, uang makan dan bertambahnya pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sehingga menyebabkan kenaikan Belanja Tunjangan Fungsional PNS.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perbandingan Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 14
Perbandingan Rincian Belanja Pegawai
TA 2024 dan TA 2023

KODE	URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	Naik(Turun) %
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11.715.582.500	10.726.082.400	9,23%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	175.117	156.366	11,99%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	882.730.460	815.746.930	8,21%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	288.326.452	259.465.460	11,12%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	431.790.000	433.950.000	-0,50%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.029.002.000	1.019.816.000	0,90%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	142.336.403	61.896.827	129,96%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	651.635.160	648.376.260	0,50%
511129	Belanja Uang Makan PNS	1.349.641.000	1.401.565.000	-3,70%
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	249.485.000	246.130.000	1,36%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	352.892.000	0	0,00%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.662	0	0,00%
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	20.931.070	0	0,00%
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.814.800	0	0,00%
511621	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	31.950.000	0	0,00%
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17.163.540	0	0,00%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	87.140.000	0	0,00%
512211	Belanja Uang Lembur	198.335.000	108.468.000	82,85%
	Jumlah Belanja Kotor	17.452.935.164	15.721.653.243	11,01%
	Pengembalian Belanja Pegawai	6.729.387	11.342.043	-40,67%
	Jumlah Belanja Bersih	17.446.205.777	15.710.311.200	9,95%



B.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp8.807.342.750,
00

Realisasi Belanja Barang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp8.807.342.750,00 atau 99,38% dari pagu sebesar Rp8.862.369.000,00. Realisasi belanja Barang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp7.903.582.874,00 atau 99,90% dari pagu sebesar Rp7.911.838.000,00. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan TA 2023

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
8.807.342.750	7.903.582.874	903.759.876	11,43%

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi sebesar Rp903.759.876,00 atau sebesar 11,43% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Kenaikan ini terjadi karena kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 lebih banyak daripada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dan kegiatan telah dilaksanakan tepat waktu dan optimal.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 16
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang TA 2024

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	1.753.980.000	1.753.648.644	-	1.753.648.644	99,98
5212	Belanja Barang Non Operasional	1.220.795.000	1.199.218.126	-	1.199.218.126	98,23
5218	Belanja Barang Persediaan	111.612.000	111.588.520	-	111.588.520	99,98
5221	Belanja Jasa	2.307.391.000	2.289.087.886	-	2.289.087.886	99,21
5231	Belanja Pemeliharaan	1.402.953.000	1.402.501.280	-	1.402.501.280	99,97
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.065.638.000	2.051.298.294	-	2.051.298.294	99,31
	JUMLAH	8.862.369.000	8.807.342.750	-	8.807.342.750	99,38

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Operasional Tahun Anggaran 2024 dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 17
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional TA 2024

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.629.483.000	1.629.157.644	-	1.629.157.644	99,98
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos pusat	210.000	205.000	-	205.000	97,62
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	104.640.000	104.640.000	-	104.640.000	100,00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19.647.000	19.646.000	-	19.646.000	99,99
	JUMLAH	1.753.980.000	1.753.648.644	-	1.753.648.644	99,98



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun Anggaran 2024 dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 18
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional TA 2024

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
521211	Belanja Bahan	657.166.000	636.389.126	-	636.389.126	96,84
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	142.250.000	141.450.000	-	141.450.000	33,57
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	421.379.000	421.379.000	-	421.379.000	34,52
	JUMLAH	1.220.795.000	1.199.218.126	-	1.199.218.126	98,23

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2024 dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 19
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan TA 2024

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	111.612.000	111.588.520	-	111.588.520	99,98
	JUMLAH	111.612.000	111.588.520	-	111.588.520	99,98

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun Anggaran 2024 dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 20
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa TA 2024

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
522111	Belanja Langganan Listrik	457.638.000	457.635.324	-	457.635.324	100,00
522112	Belanja Langganan Telepon	9.408.000	9.370.562	-	9.370.562	99,60
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.200.000	4.140.000	-	4.140.000	98,57
522141	Belanja Sewa	1.821.745.000	1.803.542.000	-	1.803.542.000	99,00
522151	Belanja Jasa Profesi	14.400.000	14.400.000	-	14.400.000	100,00
	JUMLAH	2.307.391.000	2.289.087.886	-	2.289.087.886	99,21



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2024 dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 21
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan TA 2024

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	478.754.000	478.519.361	-	478.519.361	99,95
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	150.663.000	150.656.415	-	150.656.415	100,00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	773.536.000	773.325.504	-	773.325.504	99,97
	JUMLAH	1.402.953.000	1.402.501.280	-	1.402.501.280	99,97

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2024 dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 22
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2024

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.938.428.000	1.926.068.294	-	1.926.068.294	99,36
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	127.210.000	125.230.000	-	125.230.000	98,44
	JUMLAH	2.065.638.000	2.051.298.294	-	2.051.298.294	99,31



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perbandingan Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 23
Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

KODE	URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	1.629.157.644	1.260.123.998	29,29
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	205.000	41.000	400,00
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	104.640.000	178.440.000	(41,36)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	19.646.000	35.807.200	(45,13)
521131	Beban Barang Operasional- penanganan pandemi COVID-19	-	56.469.332	
521211	Beban Bahan	636.389.126	572.653.268	11,13
521213	Beban Honor Output Kegiatan	141.450.000	95.900.000	47,50
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	421.379.000	128.200.056	228,69
522111	Beban Langganan Listrik	457.635.324	419.330.570	9,13
522112	Beban Langganan Telepon	9.370.562	9.532.175	(1,70)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.140.000	4.140.000	
522141	Beban Sewa	1.803.542.000	1.462.991.165	-
522151	Beban Jasa Profesi	14.400.000	32.400.000	(55,56)
522191	Beban Jasa Lainnya	-	6.050.000	
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	478.519.361	497.088.016	(3,74)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	195.374.652	(100,00)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	773.325.504	819.444.562	(5,63)
524111	Beban Perjalanan Biasa	1.926.068.294	1.745.465.710	10,35
524113	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	125.230.000	105.900.000	18,25
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		60.580.000	(100,00)
521811	Beban Barang Persediaan Konsumsi	111.588.520	212.090.625	(47,39)
523112	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.656.415	-	#DIV/0!
521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi COVID-19	-	5.560.545	
	Jumlah Belanja Kotor	8.807.342.750	7.903.582.874	11,43
	Pengembalian Belanja	-	-	-
	Jumlah Belanja	8.807.342.750	7.903.582.874	11,43



B.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp535.000.000,
00.

Realisasi Belanja Modal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp535.000.000,00 atau 100,00% dari pagu sebesar Rp535.000.000,00. Realisasi belanja Modal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.065.520.984,00 atau 99,81% dari pagu sebesar Rp2.069.480.000,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	535.000.000	2.065.520.984	-74,10%
Jumlah Belanja	535.000.000	2.065.520.984	-74,10%

Tabel 25
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal TA 2024

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	535.000.000	535.000.000	-	535.000.000	100,00
	JUMLAH	535.000.000	535.000.000	-	535.000.000	100,00



B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Rp535.000.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing senilai Rp535.000.000,00 dan Rp2.065.520.984,00. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar 47,65% karena adanya pembelian workstation untuk para pegawai.

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan TA 2023

AKUN	URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	535.000.000	362.340.000	47,65%
	Jumlah Belanja Kotor	535.000.000	362.340.000	0,00
	Pengembalian	-	-	0,00
	Jumlah Belanja	535.000.000	362.340.000	47,65%

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin senilai Rp535.000.000,00 yaitu berupa pembelian:

Tabel 27
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2024

Uraian	Kuantitas	Satuan	Nilai
Workstation	30	buah	Rp 420.000.000
AC Split	1	buah	Rp 7.600.000
PC unit	2	buah	Rp 47.350.000
Laptop	3	buah	Rp 53.750.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	buah	Rp 6.300.000
TOTAL			Rp 535.000.000

B.2.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.703.180.984,00. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 karena pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat pagu belanja modal Gedung dan Bangunan.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan TA 2023

AKUN	URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	1.703.180.984	-100,00%
	Jumlah Belanja Kotor	-	1.703.180.984	0,00
	Pengembalian	-	-	0,00
	Jumlah Belanja	0	1.703.180.984	-100,00%

NERACA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN





C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp0,00

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp85.389.459,00 dan Rp135.913.013,00.

Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp11.246.820,
00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp11.246.820,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2024 dan TA 2023

Persediaan	Jangka Waktu	Jumlah
Pendapatan sewa angkringan	26 -31 Desember 2024	33.031
Pendapatan sewa ATM	3 Januari -31 Desember 2024	11.213.789
Jumlah	-	11.246.820

C.1.2. Persediaan

Persediaan
Rp74.142.639,
00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp74.142.639,00 dan Rp135.913.013,00.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Persediaan TA 2024 dan TA 2023

Persediaan	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi	53.587.659	89.187.341
Bahan untuk Pemeliharaan	20.554.980	46.725.672
Jumlah	74.142.639	135.913.013

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Persediaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berupa barang konsumsi dan bahan untuk pemeliharaan. Barang konsumsi senilai Rp53.587.659,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Persediaan Barang Konsumsi

Persediaan	Nilai per 31 Desember 2024
Alat Tulis	3.298.020
Tinta Tulis, Tinta Stempel	33.165
Penjepit kertas	2.919.159
Penghapus/Korektor	39.960
Buku Tulis	2.633.920
Ordner dan map	9.128.814
Penggaris	154.290
Cutter (alat tulis kantor)	1.094.800
Alat perekat	1.852.146
Staples	2.254.500
Isi staples	1.784.045
Barang Cetak	2.235.200
Alat tulis kantor lainnya	372.680
Kertas HVS	9.813.240
Berbagai kertas	619.380
Amplop	1.400.820
Kertas dan cover lainnya	116.550
Tinta/Tone Printer	5.089.802
USB/Flashdisk	99.900
Mouse	1.936.950
Bahan Komputer Lainnya	1.110.000
Batu baterai	3.639.108
Materai	1.000.000
Perlengkapan penunjang kegiatan kantor lainnya	847.000
Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	114.210
Jumlah	53.587.659



Bahan untuk pemeliharaan senilai Rp20.554.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Bahan untuk Pemeliharaan

Bahan untuk Pemeliharaan	Nilai per 31 Desember 2024
Sapu dan Sikat	976.800
Alat-alat Pel dan Lap	6.527.910
Ember, Slang, dan Tempat Air Lainnya	355.977
Keset dan Tempat Sampah	3.485.400
Bahan Kimia Untuk Pembersih	2.695.635
Pengharum Ruangan	6.513.258
Jumlah	20.554.980

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp75.255.395.
108,00

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp75.255.395.108,00 dan Rp75.243.200.218,00.

Aset Tetap merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp61.765.207.
000,00

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp61.765.207.000,00 dan Rp61.765.207.000,00.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	61.765.207.000
Mutasi tambah:	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	61.765.207.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	61.765.207.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Saldo Tanah TA 2024

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	4500 m2	Jalan Gedongkuning No. 146 Yogyakarta	29.382.930.000
2	548 m2	Jalan Sunaryo No. 6, Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta	9.172.929.000
3	1000 m2	Jalan HOS Cokroaminota No. 158 Tegalrejo Yogyakarta	11.664.804.000
4	252 m2	Kenanga TR III/769 Tegalrejo Yogyakarta	1.586.357.000
5	418 m2	Jl. Jombor Baru Blok 8 No. 187 Sendangadi Mlati Sleman Yk	1.740.704.000
6	230 m2	Jombor Sinduadi Mlati	1.022.290.000
7	1029 m2	Ngipik RT01/16 Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta	2.903.342.000
8	837 m2	Jl. Margotirto, Pandeyan Umbulharjo Yk	4.291.851.000
Jumlah		-	61.765.207.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp17.682.179.
928,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.682.179.928,00 dan Rp17.271.356.613,00 .



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 35
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	17.271.356.613
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	535.000.000
Transfer masuk	Rp	1.530.806.834
Batal Transfer Keluar	Rp	27.602.000
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar	Rp	(169.534.573)
Koreksi Susulan	Rp	(2.429.982)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(1.510.620.964)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	17.682.179.928
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp	(15.245.205.423)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	2.436.974.505

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian senilai Rp535.000.000,00 berupa:

Tabel 36
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

Uraian	Kuantitas	Satuan	Nilai
Workstation	30	unit	Rp 420.000.000
AC Split	1	unit	Rp 7.600.000
PC Unit	2	unit	Rp 47.350.000
Laptop	3	unit	Rp 53.750.000
Printer	2	unit	Rp 6.300.000
TOTAL			Rp 535.000.000



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Transfer Masuk senilai Rp1.019.211.834,00:

Tabel 37
Rincian Transfer Masuk Peralatan dan Mesin

Uraian	Kuantitas	Nilai	Asal Transfer
Laptop	1 unit	Rp 13.825.000	BPHN
	1 unit	Rp 19.990.000	Badan Strategi Kebijakan (BSK)
Printer)Peralatan Personal Komputer)	2 buah	Rp 35.979.984	Setjen
LCD Infocus	1 unit	Rp 4.587.000	DIPA AHU
Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 unit	Rp 170.500.000	DIPA AHU
Laptop	1 unit	Rp 26.085.000	DIPA AHU
Printer)Peralatan Personal Komputer)	4 unit	Rp 38.650.000	DIPA AHU
lap top acer travelMate P21	2 unit	Rp 45.800.000	setjen
tablet pc samsung tab s9	1 unit	Rp 16.970.000	divisi imigrasi
lap top acer travelMate P21	1 unit	Rp 33.400.000	divisi imigrasi
televisi interactive flat panel	1 unit	Rp 226.034.850	setjen
P.C. Unit Acer Veriton Z4	7 unit	Rp 247.310.000	divisi imigrasi
televisi LG UHD 55 inch	1 unit	Rp 25.000.000	divisi imigrasi
Unit Power Supply wearnes	6 unit	Rp 29.280.000	divisi imigrasi
P.C. Unit Acer Veriton Z4	3 unit	Rp 85.800.000	setjen
Switch Fotrinet FS-124F FPOE Serial Number S124FFTF24021695	1 unit	Rp 109.345.000	divisi imigrasi
UPS Yosiga HPR 6 (Battery 3 unit)	1 unit	Rp 114.000.000	divisi imigrasi
Smartboard 86 Inch ST7-8608-PI Serial Number ST7-8608-PI 1024-0083	1 unit	Rp 249.750.000	divisi imigrasi
Intel Core i7-1260P Serial Number 448011FE0601	1 unit	Rp 38.500.000	divisi imigrasi
Total		Rp 1.530.806.834	

c. Batal Transfer Keluar senilai Rp27.602.000,00:

Tabel 38
Rincian Batal Transfer Keluar Peralatan dan Mesin

Uraian	Kuantitas	Nilai
Lemari Besi/Metal	2 Buah	Rp 1.666.000
Rak Besi	2 Buah	Rp 5.984.000
Meja Kerja Kayu	12 Buah	Rp 19.367.000
Kursi besi/Metal	9 Buah	Rp 585.000
Total		Rp 27.602.000



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Transfer Keluar senilai Rp169.534.573,00

Tabel 39
Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin

Uraian	Kuantitas	Nilai	Tujuan Transfer
Lemari Besi/Metal	5 Buah	Rp 4.232.000	Lapas Kelas IIA Yogyakarta
	2 buah	Rp 4.560.000	Lapas Kelas IIB Wonosari
	2 buah	Rp 1.666.000	LPP Yogyakarta (satker lama)
	2 buah	Rp 1.666.000	LPP Yogyakarta (satker baru)
	1 buah	Rp 2.625.000	LPGA Yogyakarta
Rak Besi	5 buah	Rp 14.960.000	Bapas Kelas I Yogyakarta
	2 buah	Rp 5.984.000	Lapas Kelas IIB Wonosari
	2 buah	Rp 5.984.000	LPP Yogyakarta (satker baru)
	2 buah	Rp 5.984.000	LPP Yogyakarta (satker lama)
	1 buah	Rp 2.992.000	LPGA Yogyakarta
	3 buah	Rp 8.976.000	Bapas Wonosari
Rak Kayu	3 Buah	Rp 23.900.613	Lapas Kelas IIB Sleman
Meja Kerja Kayu	4 buah	Rp 8.970.000	Rutan Kelas IIA Yogyakarta
	1 Buah	Rp 257.000	Bapas Kelas I Yogyakarta
	12 Buah	Rp 2.816.000	Lapas Kelas IIA Yogyakarta
	10 Buah	Rp 940.000	Lapas Kelas IIB Wonosari
	12 Buah	Rp 19.367.000	LPP Yogyakarta (satker lama)
	12 Buah	Rp 19.367.000	LPP Yogyakarta (satker baru)
	7 Buah	Rp 17.085.000	LPGA Yogyakarta
	5 Buah	Rp 10.909.960	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
	3 Buah	Rp 1.551.000	Rupbasan Yogyakarta
	4 Buah	Rp 425.000	Rupbasan Wates
	10 buah	Rp 1.955.000	Bapas Wonosari
Kursi Besi/Metal	24	Rp 1.819.000	Lapas Kelas IIB Wonosari
Meja Komputer	1 Buah	Rp 543.000	LPGA Yogyakarta
Total		Rp 169.534.573	

e. Koreksi Susulan sebesar Rp2.429.982,00:

Tabel 40
Rincian Koreksi Susulan Peralatan dan Mesin

Uraian	Kuantitas	Nilai
Handy Talky (HT)	1 buah	Rp 2.429.982
Total		Rp 2.429.982

Koreksi susulan nilai berkurang 6 (enam) unit HT tindak lanjut temuan BPK atas pengadaan Handy Talky (HT) tahap 2 TA 2023 pada Unit Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

f. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp1.510.620.964,00:

Tabel 41
Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan -Peralatan dan Mesin

Uraian	Kuantitas	Nilai
Portabel Generating Set	1	Rp 23.000.000
Sepeda Motor	3	Rp 23.800.000
Brankas	6	Rp 9.995.000
LCD Projector/Infocus	3	Rp 24.685.000
Meja Kerja Kayu	37	Rp 5.487.000
Kursi Kayu	7	Rp 5.600.000
Meja Komputer	7	Rp 4.968.000
Meja Telepon	7	Rp 364.000
AC Split	16	Rp 92.659.000
Alat Dapur Lainnya	4	Rp 6.500.000
Televisi	2	Rp 13.750.000
DVD Player	1	Rp 2.887.500
Bendera Negara	2	Rp 1.300.000
Uninterrupted Power Supply (USB)	4	Rp 3.490.000
Camera Digital	4	Rp 35.959.000
Handy Talky (HT)	11	Rp 8.250.000
Alat Komunikasi Telephone Lainnya	5	Rp 23.925.000
Alat komunikasi Khusus Lainnya	1	Rp 554.151.511
Alat Komunikasi Lainnya	1	Rp 5.643.000
UV Sterilizer	10	Rp 12.150.000
PC Unit	22	Rp 220.328.512
Laptop	11	Rp 134.327.682
Note Book	9	Rp 108.603.410
Tablet PC	5	Rp 37.717.218
Hard Disk	3	Rp 3.108.336
Speaker Komputer	1	Rp 533.000
Printer (Peralatan Personal	15	Rp 21.238.795
Scanner (Peralatan Personal	4	Rp 123.200.000
Server	1	Rp 3.000.000
Total		Rp 1.510.620.964



C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp13.517.329.
612,00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp13.517.329.612,00 dan Rp13.517.329.612,00.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 42
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2023	13.517.329.612
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	13.517.329.612
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2.748.556.589)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	10.768.773.023

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp284.440.580,
,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp284.440.580,00 dan Rp396.540.580,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian dan monografi.

Rincian Mutasi Set Aset Tetap Lainnya dijelaskan dalam Tabel berikut

Tabel 43
Rincian Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2023	396.540.580
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	15.000.000
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(127.100.000)
Saldo per 31 Desember 2024	284.440.580
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	284.440.580



Transaksi Transfer keluar Aset Tetap Lainnya berupa Alat Musik Tradisional (gamelan) senilai Rp127.100.000,00 ditransfer keluar ke Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
17.993.762.012
,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp17.993.762.012,00 dan Rp17.707.233.587,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 44

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 61.765.207.000	0	Rp 61.765.207.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 17.682.179.928	15.245.205.423	Rp 2.436.974.505
3	Gedung dan Bangunan	Rp 13.517.329.612	2.748.556.589	Rp 10.768.773.023
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 284.440.580	0	Rp 284.440.580
Akumulasi Penyusutan		Rp 93.249.157.120	Rp 17.993.762.012	Rp 75.255.395.108

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp98.609.365,00

Nilai perolehan Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp98.609.365,00 dan Rp13.125.000,00.



C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp1.732.938.000
,00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.732.938.000,00 dan Rp1.732.938.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.732.938.000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	1.732.938.000
Akumulasi Amortisasasi s.d. 31 Desember 2024	(1.719.813.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	13.125.000

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Aplikasi E-Office	1,515,420,500
Aplikasi E-Notaris	182,517,500
Aplikasi NotaLog	35,000,000
	1,732,938,000

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp94.234.365,
00

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp94.234.365,00 dan Rp0,00.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY memiliki Dana Yang Dibatasi Penggunaannya atas progress pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayaran yaitu belanja keperluan perkantoran (pembayaran pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan, Satpam/Keamanan, dan Sopir pada



Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY TA 2024) dengan rincian pembayaran tenaga kebersihan sebesar Rp32.185.250,00 tenaga satpam/keamanan sebesar Rp44.813.250,00 dan tenaga sopir sebesar Rp17.235.865,00.

C.3.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp577.951.511
,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp577.951.511,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	-
Mutasi tambah:		
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	1.510.620.964
Mutasi kurang:		
Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	Rp	(932.669.453)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	577.951.511
Akumulasi Penyusutan	Rp	(577.951.511)
Nilai Buku per 30 September 2024	Rp	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp2.306.514.511.
,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.306.514.511,00 dan Rp1.719.813.000,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.



Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 48
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	1.732.938.000	-1.728.563.000	4.375.000
Aset Lain-lain	577.951.511	-577.951.511	0
Jumlah	1.732.938.000	-2.306.514.511	4.375.000

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp133.791.278,00*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp133.791.278,00 dan Rp41.060.950,00.

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp133.791.278,00*

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp133.791.278,00 dan sebesar Rp39.020.113,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Utang kepada Pihak Ketiga berupa Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar berupa Layanan Daya Jasa Listrik PLN bulan Desember 2024.



Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

No	Uraian	Jumlah
1	Layanan Daya dan Jasa Listrik PLN bulan Desember 2024	39.556.913
2	Belanja Keperluan Perkantoran (RPATA)	94.234.365
	Jumlah	133.791.278

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp0,00

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.040.837,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah Pendapatan PNBPN yang diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Tabel 50
**Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka
TA 2024 dan TA 2023**

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan sewa angkringn	-	61.699
Pendapatan sewa ATM	-	1.979.138
Jumlah	-	2.040.837

C.5. Ekuitas

Ekuitas
Rp75.294.355.834,
00

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp75.294.355.834,00 dan Rp75.351.177.281,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

LAPORAN OPERASIONAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN





D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp44.234.699,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp44.234.699,00 dan Rp56.156.158,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 51
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
TA 2024 dan TA 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	42.193.862	42.889.532	-1,62%
Jurnal Balik Pendapatan Sewa Dibayar Dimuka (Sewa ATM)	61.699	3.985.764	-98,45%
Jurnal Balik Pendapatan Sewa Dibayar Dimuka (Sewa kantin)	1.979.138	11.321.699	-82,52%
Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka (sewa ATM)	11.213.789	(61.699)	-18274,99%
Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka (sewa angkringan)	33.031	(1.979.138)	-101,67%
Jumlah	55.481.519	56.156.158	(0,01)

Perbandingan Pendapatan PNB-LO dengan Pendapatan PNB-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 52
Perbandingan Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA
TA 2024

Pendapatan PNB-LO	Pendapatan PNB-LRA	Selisih
55.481.519	81.513.637	(26.032.118)



Rincian selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Selisih PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA
TA 2024

Uraian	Pendapatan PNBP-LO	Pendapatan PNBP-LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	42.193.862	42.193.862	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5.241.700	(5.241.700)
Jurnal Balik Pendapatan Diterima Dimuka (Sewa ATM)	61.699	-	61.699
Jurnal Balik Pendapatan Diterima Dimuka (Sewa kantin)	1.979.138	-	1.979.138
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin	-	31.578.075	(31.578.075)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	2.500.000	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima (sewa angkringan)	33.031		
Pendapatan yang Masih Harus Diterima (sewa ATM BRI)	11.213.789		
Total	55.481.519	81.513.637	(26.032.118)

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp17.446.205.777,
,00

Beban Pegawai-LO pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.446.205.777,00 dan Rp15.706.993.117,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Perbandingan Beban Pegawai-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 54
Rincian Perbandingan Beban Pegawai-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
TA 2024 dan TA 2023

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
511111	Beban Gaji Pokok PNS	11.715.582.500	10.717.283.416	0,09
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	175.117	155.232	0,13
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	882.730.460	814.867.032	0,08
511122	Beban Tunj. Anak PNS	288.326.452	259.170.818	0,11
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	431.790.000	432.870.000	0,00
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.029.002.000	1.019.323.000	0,01
511125	Beban Tunj. PPh PNS	142.336.403	61.847.019	1,30
511126	Beban Tunj. Beras	651.635.160	647.796.900	0,01
511129	Beban Uang Makan PNS	1.349.641.000	1.400.021.700	-0,04
511151	Beban Tunj. Umum PNS	249.485.000	245.190.000	0,02
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	352.892.000	-	0,00
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.662	-	0,00
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	20.931.070	-	0,00
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3.814.800	-	0,00
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	31.950.000	-	0,00
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	17.163.540	-	0,00
511628	Beban Uang Makan PPPK	87.140.000	-	0,00
512211	Beban Lembur	198.335.000	108.468.000	0,83
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(4.479)		
511123	Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS	(2.634.808)		
511124	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS	(2.160.000)		
511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	(1.930.100)		
	Jumlah	17.446.205.777	15.706.993.117	0,11



Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 55
Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
TA 2024

Beban Pegawai-LO	Belanja Pegawai-LRA	Selisih
17.446.205.777	17.446.205.777	-

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp147.188.202,00

Beban Persediaan-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp147.188.202,00 dan Rp206.895.879,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Perbandingan Beban Persediaan-LO TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 56
Perbandingan Beban Persediaan-LO
TA 2024 dan TA 2023

Akun	Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
593111	Beban Persediaan Konsumsi	147.188.202	206.895.879	(28,86)
	Jumlah Beban Persediaan	147.188.202	206.895.879	(28,86)

Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 57
Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
TA 2024

Beban Persediaan-LO	Belanja Persediaan-LRA	Selisih
147.188.202	111.588.520	35.599.682



Penjelasan selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA TA 2024 dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 58
Perhitungan Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
TA 2024

Beban Persediaan LO	147.188.202
Belanja Barang Persediaan LRA (Akun 5218xx)	111.588.520
Selisih Antara LO dan LRA	35.599.682
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Persediaan Awal	135.913.013
Persediaan Akhir	74.142.639
Kenaikan/Penurunan Persediaan	61.770.374
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	176.827.107
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	
Gedung dan Bangunan	150.656.415
FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI	
Koreksi Persediaan yang bernilai positif	-
Total Beban Persediaan	147.188.202
Selisih	-

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp5.242.491.456,
00*

Beban Barang dan Jasa-LO pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.242.491.456,00 dan Rp4.265.806.563,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 59
Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO
TA 2024 dan 2023

Akun	Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	1.629.157.644	1.259.605.873	29,34
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	205.000	41.000	400,00
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	104.640.000	178.440.000	(41,36)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	19.646.000	35.807.200	(45,13)
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	56.987.457	(100,00)
521211	Beban Bahan	636.389.126	572.653.268	11,13
521213	Beban Honor Output Kegiatan	141.450.000	95.900.000	47,50
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	421.379.000	128.200.056	228,69
522111	Beban Langganan Listrik	458.172.124	423.058.369	8,30
522112	Beban Langganan Telepon	9.370.562	9.532.175	(1,70)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.140.000	4.140.000	0,00
522141	Beban Sewa	1.803.542.000	1.462.991.165	23,28
522151	Beban Jasa Profesi	14.400.000	32.400.000	(55,56)
522191	Beban Jasa Lainnya	0	6.050.000	
	Jumlah	5.242.491.456	4.265.806.563,00	22,90

Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 60
Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
TA 2024

Beban Barang dan Jasa-LO	Belanja Barang-LRA	Selisih
5.242.491.456	8.807.342.750	(3.564.851.294)



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 61
Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
TA 2024

Uraian	Beban Barang dan Jasa-LO	Belanja Barang LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	1.629.157.644	1.629.157.644	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	205.000	205.000	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	104.640.000	104.640.000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	19.646.000	19.646.000	-
Beban Bahan	636.389.126	636.389.126	-
Beban Honor Output Kegiatan	141.450.000	141.450.000	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	421.379.000	421.379.000	-
Beban Langganan Listrik	458.172.124	457.635.324	536.800
Beban Langganan Telepon	9.370.562	9.370.562	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.140.000	4.140.000	-
Beban Sewa	1.803.542.000	1.803.542.000	-
Beban Jasa Profesi	14.400.000	14.400.000	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	478.519.361	(478.519.361)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	773.325.504	(773.325.504)
Beban Perjalanan Biasa	0	1.926.068.294	(1.926.068.294)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	125.230.000	(125.230.000)
Beban Barang Persediaan Konsumsi	0	111.588.520	(111.588.520)
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	150.656.415	(150.656.415)
Jumlah	5.242.491.456	8.807.342.750	-3.564.851.294

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.428.671.972,00 dan Rp1.463.804.048,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban
Pemeliharaan
Rp1.428.671.972,
00



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban pemeliharaan TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 62
Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO
TA 2024 dan TA 2023

Akun	Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	478.519.361	497.088.016	-3,74
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	#DIV/0!
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	773.325.504	819.444.562	-5,63
593113	Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	176.827.107	147.271.470	0,00
	Jumlah	1.428.671.972	1.463.804.048	-2,40

Beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada TA 2024 mengalami penurunan dibandingkan TA 2023 sebesar 2,40% karena kegiatan pemeliharaan di tahun 2024 kegiatan pemeliharaan lebih sedikit daripada tahun 2023.

Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 63
Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
TA 2024

Beban Pemeliharaan-LO	Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
1.428.671.972	1.402.501.280	26.170.692



Perhitungan Selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 64
Perhitungan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan -LRA
TA 2024

Beban Pemeliharaan LO	1.428.671.972
Belanja Pemeliharaan LRA (Akun 523xx)	1.402.501.280
Selisih Antara LO dan LRA	26.170.692
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.656.415
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	176.827.107
Total Beban Persediaan	1.428.671.972
Selisih	-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp2.051.298.294
,00

Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.051.298.294,00 dan Rp1.911.945.710,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 65
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
TA 2024 dan TA 2023

Akun	Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
524111	Beban Perjalanan Biasa	1.926.068.294	1.745.465.710	10,35
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	125.230.000	105.900.000	18,25
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	60.580.000	0,00
	Jumlah	2.051.298.294	1.911.945.710	7,29



Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 66
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas -LRA TA 2024

Beban Perjalanan Dinas-LO	Belanja Perjalanan Dinas-LRA	Selisih
2.051.298.294	8.807.342.750	(6.756.044.456)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.531.720.489,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.531.720.489,00 dan Rp2.614.667.878,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 67
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Untuk Periode Yang Berakhir TA 2024 dan 2023

Akun	Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.056.710.410	855.035.649	23,59
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	466.260.079	431.547.729	8,04
	Jumlah Penyusutan	1.522.970.489	1.286.583.378	18,37
592115	Beban Amortisasi Software	8.750.000	1.328.084.500	(99,34)
	Jumlah Amortisasi	8.750.000	1.328.084.500	(99,34)
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.531.720.489	2.614.667.878	(41,42)



D.8. Kegiatan Non Operasional

D.8.1. Pendapatan Pelepasan Aset

Pendapatan

Penglepasan Aset

Rp34.078.075,00

Pendapatan Penglepasan Aset Non Lancar-LO pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pendapatan atas penjualan 1 (satu) paket kayu dan besi hasil bongkaran rumah negara dan gedung kantor senilai Rp2.500.000,00 dan pendapatan atas penjualan 1 (satu) paket peralatan mesin inventaris kantor senilai Rp31.578.075,00.

Pendapatan Penglepasan Aset Non Lancar-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp34.078.075,00 dan Rp28.825.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68
Perbandingan Pendapatan Penglepasan Aset -LO
TA 2024 dan TA 2023

Akun	Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.500.000	-	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	31.578.075	28.825.100	0,10
	Total	34.078.075	28.825.100	0,00

D.8.2. Beban Pelepasan Aset

Beban Penglepasan

Aset

Rp34.905.000,00

Beban Pelepasan Aset -LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp34.905.000,00 merupakan nilai buku berupa 233 unit Barang Milik Negara yang telah dilakukan penghapusan sesuai SK Penghapusan nomor: W.14-15791.PB.05.05 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pelepasan Aset -LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp34.905.000,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69
Perbandingan Beban Pelepasan Aset -LO
TA 2024 dan TA 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Nilai buku berupa 233 unit Barang Milik Negara yang telah dilakukan penghapusan sesuai SK Penghapusan nomor: W.14-15791.PB.05.05 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024.	34.905.000	-	0,00
Total	34.905.000	-	0,00

D.8.3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.241.700,00 dan Rp187.041,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO
TA 2024 dan 2023

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5.241.700	187.041	2702,43
	Total	5.241.700	187.041	2702,43

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp5.241.700,00



Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 71
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO
Dan Pendapatan Lain-lain-LRA
TA 2024

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Pendapatan Lain-lain-LRA	Selisih
5.241.700	5.241.700	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN





E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

*Rp75.351.177.281,
00*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp75.351.177.281,00 dan Rp73.895.870.456,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus(defisit) LO

*Rp(26.982.775.045,
00)*

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp26.982.775.045,00 dan Rp26.084.944.896,00. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luarbiasa.

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang

Menambah/

Mengurangi Ekuitas

Rp2.429.982,00

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.429.982,00 dan Rp1.319.288.420,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset

Non Revaluasi

Rp2.429.982,00

Nilai Koreksi Nilai Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.429.982,00 dan Rp1.319.288.420,00. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 72
Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
TA 2024

Akun	Keterangan	Nilai
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.429.982
Jumlah		2.429.982

Koreksi nilai aset non revaluasi senilai Rp2.429.982,00 berupa koreksi Handy Talky sebagai tindak lanjut temuan BPK atas pengadaan Handy Talky (HT) tahap 2 TA 2023 pada Unit Pusat Direktorat Jenderal Pemasarakatan.



E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp27.232.940.251
,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp27.232.940.251,00 dan sebesar Rp26.220.963.301,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Perhitungan Transaksi Antar Entitas-LPE untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 73
Perhitungan Transaksi Antar Entitas-LPE
TA 2024 dan TA 2023

No	Transaksi Antar Entitas	TA 2024	TA 2023
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	26.788.548.527	25.679.415.058
2	Diterima Dari Entitas Lain	(81.513.637)	(71.901.673)
3	Transfer Keluar	(139.701.600)	(23.760.000)
4	Transfer Masuk	665.606.961	637.209.916
	Jumlah	27.232.940.251	26.220.963.301

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

a. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar Rp81.513.637,00 sedangkan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp26.788.548.537,00.

b. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Rincian Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp665.606.961,00 disajikan dalam Tabel berikut:



Tabel 74
Rincian Transfer Masuk
TA 2024

Uraian	Kuantitas	Nilai	Asal Transfer
Laptop	1 unit	Rp 13.825.000	BPHN
Laptop	1 unit	Rp 19.990.000	Badan Strategi Kebijakan (BSK)
Printer)Peralatan Personal Komputer)	2 buah	Rp 35.979.984	Setjen
LCD Infocus	1 unit	Rp 4.587.000	DIPA AHU
Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 unit	Rp 170.500.000	DIPA AHU
Laptop	1 unit	Rp 26.085.000	DIPA AHU
Printer)Peralatan Personal Komputer)	4 unit	Rp 38.650.000	DIPA AHU
lap top acer travelMate P21	2 unit	Rp 45.800.000	setjen
tablet pc samsung tab s9	1 unit	Rp 16.970.000	divisi imigrasi
lap top acer travelMate P21	1 unit	Rp 33.400.000	divisi imigrasi
televisi interactive flat panel	1 unit	Rp 226.034.850	setjen
P.C. Unit Acer Veriton Z4	7 unit	Rp 247.310.000	divisi imigrasi
televisi LG UHD 55 inch	1 unit	Rp 25.000.000	divisi imigrasi
Unit Power Supply wearnes	6 unit	Rp 29.280.000	divisi imigrasi
P.C. Unit Acer Veriton Z4	3 unit	Rp 85.800.000	setjen
Penyusutan transaksional		Rp (353.604.873)	
Total		Rp 665.606.961	

c. Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp139.701.600,00 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 75
Rincian Transfer Keluar
TA 2024

Uraian	Kuantitas	Nilai	Tujuan Transfer
Lemari Besi/Metal	5 Buah	Rp 4.478.000	Lapas Kelas IIA Yogyakarta
	2 buah	Rp 5.484.000	Lapas Kelas IIB Wonosari
	2 buah	Rp 1.666.000	LPP Yogyakarta
	1 buah	Rp 2.662.000	LPKA Yogyakarta
Rak Besi	5 buah	Rp 14.960.000	Bapas Kelas I Yogyakarta
	2 buah	Rp 5.984.000	Lapas Kelas IIB Wonosari
	2 buah	Rp 5.984.000	LPP Yogyakarta
	1 buah	Rp 2.992.000	LPKA Yogyakarta
	3 buah	Rp 8.976.000	Bapas Wonosari
Rak Kayu	3 Buah	Rp 23.900.613	Lapas Kelas IIB Sleman
Meja Kerja Kayu	4 buah	Rp 8.970.000	Rutan Kelas IIA Yogyakarta
	1 Buah	Rp 257.000	Bapas Kelas I Yogyakarta
	12 Buah	Rp 2.570.000	Lapas Kelas IIA Yogyakarta
	10 Buah	Rp 940.000	Lapas Kelas IIB Wonosari
	12 Buah	Rp 19.367.000	LPP Yogyakarta
	7 Buah	Rp 17.085.000	LPKA Yogyakarta
	5 Buah	Rp 10.909.960	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
	3 Buah	Rp 1.551.000	Rupbasan Yogyakarta
	4 Buah	Rp 425.000	Rupbasan Wates
	10 buah	Rp 1.284.000	Bapas Wonosari
Kursi Besi/Metal	5 buah	Rp 310.000	Lapas Kelas IIB Wonosari
	7 buah	Rp 707.000	LPP Yogyakarta
	5 buah	Rp 671.000	Bapas Wonosari
Meja Komputer	1 Buah	Rp 543.000	LPKA Yogyakarta
Akumulasi Penyusutan Transaksional		Rp (2.974.973)	
Total		Rp 139.701.600	

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp75.294.355.834
,00

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp75.294.355.834,00 dan Rp75.351.177.281,00.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN





F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1. Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyusun Kebijakan Akuntansi Akrua yang memuat transaksi-transaksi spesifik, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang didahului dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

1. Terdapat jurnal manual untuk pencatatan pengakuan utang atas progress pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayaran yaitu belanja keperluan perkantoran (pembayaran pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan, Keamanan, dan Sopir pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY TA 2024) dengan jurnal: Utang Yang Belum Diterima Tagihannya (218111/D) senilai Rp94.234.365,00 dan Utang Kepada Pihak Ketiga (212191/K) senilai Rp94.234.365,00. Hal ini disebabkan adanya kebijakan KPPN Yogyakarta untuk menggunakan RPATA atas BAST di atas tanggal 23 Desember 2024.
2. Terdapat jurnal penyesuaian untuk pencatatan atas belanja listrik bulan Desember 2024 yaitu Belanja Langganan Listrik (522111/D) senilai Rp39.556.913,00 dan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112/L) senilai Rp39.556.913,00.
3. Terdapat jurnal penyesuaian untuk pencatatan Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas pendapatan sewa angkringan senilai Rp33.031,00 dengan jurnal Pendapatan yang Masih Harus Diterima (114311/D) senilai Rp33.031,00 dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131/K) senilai Rp33.031,00.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Terdapat jurnal penyesuaian untuk pencatatan Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas pendapatan sewa ATM BRI senilai Rp11.213.789,00 dengan jurnal Pendapatan yang Masih Harus Diterima (114311/D) senilai Rp11.213.789,00 dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131/K) senilai Rp11.213.789,00.
5. Output strategis yang telah dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 76
Rincian Capaian Output
TA 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Hukum dan HAM
Unit Organisasi : (01) Sekretaris Jenderal
Satuan Kerja : (409181) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : Pembinaan Hukum
Program : Program Dukungan Manajemen
Lokasi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013.01. WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
1558	Kegiatan Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif								
EBA.956	Layanan BMN	96.760.000	96.739.915	99,98	1	1	layanan	100	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	234.100.000	230.166.506	98,32	1	1	layanan	100	
EBA.959	Layanan Protokol	71.200.000	52.546.999	73,80	1	1	layanan	100	
EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	13.700.000	13.700.000	100,00	1	1	layanan	100	
EBA.962	Layanan Umum	138.209.000	137.155.968	99,24	1	1	layanan	100	
EBA.994	Layanan Perkantoran	22.779.215.000	22.620.583.655	99,30	1	1	layanan	100	
EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	535.000.000	535.000.000	100,00	34	34	unit	100	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.803.214.000	1.802.838.783	99,98	1	1	layanan	100	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	404.180.000	398.094.923	98,49	1	1	dokumen	100	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	252.544.000	249.464.453	98,78	1	1	dokumen	100	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	306.102.000	304.176.274	99,37	1	1	dokumen	100	
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	156.510.000	152.133.805	95,98	1	1	dokumen	100	
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	76.200.000	75.982.835	99,72	1	1	dokumen	100	
	Subtotal	26.868.964.000,00	26.668.583.914,00	99,25					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)*	-	-	0,00					
	Total	26.868.964.000,00	26.668.583.914,00	99,25					

6. Pada Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh pendapatan dari Tanah, Gedung, dan Bangunan atas penjualan 1 (satu) paket kayu dan besi hasil bongkaran rumah negara dan gedung kantor senilai Rp2.500.000,00 dan pendapatan atas penjualan 1 (satu) paket peralatan mesin inventaris kantor senilai Rp31.578.075,00.

LAMPIRAN 1

- Surat Hasil Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran periode 31 Desember 2024
- *Printout* Laporan Keuangan Aplikasi MONSAKTI periode 31 Desember 2024





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409181
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	26,868,934,000	26,868,934,000	0
2	Belanja	26,795,277,914	26,795,277,914	0
3	Pengembalian Belanja	-6,729,387	-6,729,387	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	81,513,637	81,513,637	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 05-FEB-25



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 0400

SATUAN KERJA : 409181

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

SEKRETARIAT JENDERAL

DI YOGYAKARTA

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Tgl. Cetak 17/02/2025 8:03 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	89,187,341	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	46,725,672	0
0.0	131111	Tanah	61,765,207,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	17,271,356,613	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	13,517,329,612	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	396,540,580	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	15,424,937,077
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,282,296,510
0.0	162151	Software	1,732,938,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,719,813,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	39,020,113
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,040,837
0.0	391111	Ekuitas	0	75,351,177,281
JUMLAH			94,819,284,818	94,819,284,818

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YOGYAKARTA

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 17/02/25 8:02 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	11,246,820	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	53,587,659	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	20,554,980	0
0.0	131111	Tanah	61,765,207,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	17,682,179,928	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	13,517,329,612	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	284,440,580	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	15,245,205,423
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,748,556,589
0.0	162151	Software	1,732,938,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	94,234,365	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	577,951,511	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	577,951,511
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,728,563,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	39,556,913
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	94,234,365
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	26,788,548,527
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	81,513,637	0
0.0	313211	Transfer Keluar	139,701,600	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,177,201,961
0.0	391111	Ekuitas	0	75,351,177,281
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2,429,982	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,500,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	31,578,075
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	55,481,519
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,241,700
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	11,715,582,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	170,638	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	882,730,460	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	288,326,452	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	429,155,192	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,026,842,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	142,336,403	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	651,635,160	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,347,710,900	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	249,485,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	352,892,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,662	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YOGYAKARTA

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM
Tgl Cetak : 17/02/25 8:02 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	20,931,070	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,814,800	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	31,950,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	17,163,540	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	87,140,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	198,335,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,629,157,644	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	205,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	104,640,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	19,646,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	636,389,126	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	141,450,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	421,379,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	458,172,124	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	9,370,562	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,140,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,803,542,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	14,400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	478,519,361	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	773,325,504	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,926,068,294	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	125,230,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,056,710,410	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	466,260,079	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	8,750,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	147,188,202	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	176,827,107	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	34,905,000	0
JUMLAH			123,845,796,864	123,845,796,864

Keterangan :

null
null
null

YOGYAKARTA, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YOGYAKARTA

Tgl Data : 17/02/25 12:28 AM
Tgl Cetak : 17/02/25 8:02 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	26,788,548,527
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	81,513,637	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,500,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	31,578,075
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	42,193,862
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,241,700
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,715,582,500	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	175,117	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	882,730,460	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	288,326,452	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	431,790,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,029,002,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	142,336,403	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	651,635,160	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,349,641,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	249,485,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	352,892,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,662	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	20,931,070	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,814,800	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	31,950,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17,163,540	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	87,140,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	198,335,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,629,157,644	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	205,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	104,640,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19,646,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	636,389,126	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	141,450,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	421,379,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	111,588,520	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	457,635,324	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	9,370,562	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,140,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,803,542,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	14,400,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	478,519,361	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YOGYAKARTA

Tgl Data : 17/02/25 12:28 AM
Tgl Cetak : 17/02/25 8:02 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150,656,415	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	773,325,504	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,926,068,294	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	125,230,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	535,000,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	4,479
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,634,808
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	2,160,000
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	1,930,100
JUMLAH			26,876,791,551	26,876,791,551

Keterangan :

null
null
null

YOGYAKARTA, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG REKTONO SETO
197012021999031001

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Tgl Data : 17/02/25 12:28 AM

Tgl Cetak : 17/02/25 7:59 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	11,246,820	0	11,246,820	0.00
Persediaan	74,142,639	135,913,013	(61,770,374)	(45.45)
JUMLAH ASET LANCAR	85,389,459	135,913,013	(50,523,554)	(37.17)
ASET TETAP				
Tanah	61,765,207,000	61,765,207,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	17,682,179,928	17,271,356,613	410,823,315	2.38
Gedung dan Bangunan	13,517,329,612	13,517,329,612	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	284,440,580	396,540,580	(112,100,000)	(28.27)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(17,993,762,012)	(17,707,233,587)	(286,528,425)	1.62
JUMLAH ASET TETAP	75,255,395,108	75,243,200,218	12,194,890	0.02
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,732,938,000	1,732,938,000	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	94,234,365	0	94,234,365	0.00
Aset Lain-lain	577,951,511	0	577,951,511	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,306,514,511)	(1,719,813,000)	(586,701,511)	34.11
JUMLAH ASET LAINNYA	98,609,365	13,125,000	85,484,365	651.31
JUMLAH ASET	75,439,393,932	75,392,238,231	47,155,701	0.06
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	133,791,278	39,020,113	94,771,165	242.88
Pendapatan Diterima Dimuka	0	2,040,837	(2,040,837)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	133,791,278	41,060,950	92,730,328	225.84
JUMLAH KEWAJIBAN	133,791,278	41,060,950	92,730,328	225.84
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	75,305,602,654	75,351,177,281	(45,574,627)	(0.06)
JUMLAH EKUITAS	75,305,602,654	75,351,177,281	(45,574,627)	(0.06)
JUMLAH EKUITAS	75,305,602,654	75,351,177,281	(45,574,627)	(0.06)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	75,439,393,932	75,392,238,231	47,155,701	0.06

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Tgl Data : 17/02/25 12:28 AM

Tgl Cetak : 17/02/25 7:59 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

YOGYAKARTA, 17 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG REKTONO SETO

NIP. 197012021999031001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 409181 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Tgl.Data : 17/02/25 12:28 AM
Tgl.Cetak : 17/02/25 8:05 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	53,587,659
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	20,554,980
131111	Tanah	61,765,207,000
132111	Peralatan dan Mesin	17,682,179,928
133111	Gedung dan Bangunan	13,517,329,612
135121	Aset Tetap Lainnya	284,440,580
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15,245,205,423)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,748,556,589)
162151	Software	1,732,938,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	577,951,511
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(577,951,511)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,728,563,000)
J U M L A H		75,333,912,747

Yogyakarta, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

UAPB : 013
UAKPB : 409181

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Tgl Data : 17/02/25 12:28 AM
Tanggal : 17/02/25 8:05 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	3,298,020
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	33,165
1010301003	Penjepit Kertas	2,919,159
1010301004	Penghapus/Korektor	39,960
1010301005	Buku Tulis	2,633,920
1010301006	Ordner Dan Map	9,128,814
1010301007	Penggaris	154,290
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	1,094,800
1010301010	Alat Perekat	1,852,146
1010301012	Staples	2,254,500
1010301013	Isi Staples	1,784,045
1010301014	Barang Cetak	2,235,200
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	372,680
1010302001	Kertas HVS	9,813,240
1010302002	Berbagai Kertas	619,380
1010302004	Amplop	1,400,820
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	116,550
1010304004	Tinta/Toner Printer	5,089,802
1010304006	USB/Flash Disk	99,900
1010304010	Mouse	1,936,950
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	1,110,000
1010306010	Batu Baterai	3,639,108
1010309001	Meterai	1,000,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	847,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	114,210
Jumlah Barang Konsumsi		53,587,659
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	976,800
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	6,527,910
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	355,977
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	3,485,400
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	2,695,635
1010305012	Pengharum Ruangan	6,513,258
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		20,554,980
TOTAL		74,142,639

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp.

0 dalam kondisi rusak.

2. Persediaan senilai Rp.

0 dalam kondisi usang.

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YOGYAKARTA

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM
Tgl Cetak : 17/02/25 8:00 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	55,481,519	56,156,158	(674,639)	(1.201)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	55,481,519	56,156,158	(674,639)	(1.201)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	55,481,519	56,156,158	(674,639)	(1.201)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	17,446,205,777	15,706,993,117	1,739,212,660	11.073
Beban Persediaan	147,188,202	206,895,879	(59,707,677)	(28.859)
Beban Barang dan Jasa	5,242,491,456	4,265,806,563	976,684,893	22.896
Beban Pemeliharaan	1,428,671,972	1,463,804,048	(35,132,076)	(2.4)
Beban Perjalanan Dinas	2,051,298,294	1,911,945,710	139,352,584	7.289
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YOGYAKARTA

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM
Tgl Cetak : 17/02/25 8:00 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,531,720,489	2,614,667,878	(1,082,947,389)	(41.418)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	27,847,576,190	26,170,113,195	1,677,462,995	6.41
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(27,792,094,671)	(26,113,957,037)	(1,678,137,634)	6.426
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(826,925)	28,825,100	(29,652,025)	(102.869)
Pendapatan Pelepasan Aset	34,078,075	28,825,100	5,252,975	18.224
Beban Pelepasan Aset	34,905,000	0	34,905,000	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,241,700	187,041	5,054,659	2,702.434
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,241,700	187,041	5,054,659	2,702.434
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4,414,775	29,012,141	(24,597,366)	(84.783)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(27,787,679,896)	(26,084,944,896)	(1,702,735,000)	6.528
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(27,787,679,896)	(26,084,944,896)	(1,702,735,000)	6.528

Keterangan :
null
null
null

YOGYAKARTA, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YOGYAKARTA

Tgl Data : 17/02/25 12:28 AM
Tgl Cetak : 17/02/25 8:01 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	75,351,177,281	73,895,870,456	1,455,306,825	1.97
SURPLUS/DEFISIT-LO	(27,787,679,896)	(26,084,944,896)	(1,702,735,000)	6.53
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(2,429,982)	1,319,288,420	(1,321,718,402)	(100.18)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(2,429,982)	1,319,288,420	(1,321,718,402)	(100.18)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	27,744,535,251	26,220,963,301	1,523,571,950	5.81
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(45,574,627)	1,455,306,825	(1,500,881,452)	(103.13)
EKUITAS AKHIR	75,305,602,654	75,351,177,281	(45,574,627)	(0.06)

Keterangan :
null
null
null

YOGYAKARTA, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM
Tgl Cetak : 17/02/25 8:01 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	81,513,637	81,513,637	0	0	71,901,673	(71,901,673)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	81,513,637	81,513,637	0	0	71,901,673	(71,901,673)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	81,513,637	81,513,637	0	0	71,901,673	(71,901,673)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	26,868,934,000	26,788,548,527	(80,385,473)	100	25,790,951,000	25,679,415,058	111,535,942	100
1. Belanja Pegawai	17,471,565,000	17,446,205,777	(25,359,223)	100	15,809,633,000	15,710,311,200	99,321,800	99
2. Belanja Barang	8,862,369,000	8,807,342,750	(55,026,250)	99	7,911,838,000	7,903,582,874	8,255,126	100
3. Belanja Modal	535,000,000	535,000,000	0	100	2,069,480,000	2,065,520,984	3,959,016	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM
Tgl Cetak : 17/02/25 8:01 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	26,868,934,000	26,788,548,527	(80,385,473)	100	25,790,951,000	25,679,415,058	111,535,942	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

null
null
null

YOGYAKARTA, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG REKTONO SETO
NIP. 197012021999031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 409181 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 17/02/25 8:03 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,500,000	0	2,500,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	31,578,075	0	31,578,075	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	42,193,862	0	42,193,862	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	76,271,937	0	76,271,937	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,241,700	0	5,241,700	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	5,241,700	0	5,241,700	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	81,513,637	0	81,513,637	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	81,513,637	0	81,513,637	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 409181
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
DI YOGYAKARTA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 17/02/25 8:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 15/2/25 3:53 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,232,600,000	11,715,584,000	11,715,582,500	0	11,715,582,500	100	1,500
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	168,000	178,000	175,117	4,479	170,638	95.86	7,362
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	776,160,000	882,732,000	882,730,460	0	882,730,460	100	1,540
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	245,000,000	288,328,000	288,326,452	0	288,326,452	100	1,548
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	456,400,000	431,820,000	431,790,000	2,634,808	429,155,192	99.38	2,664,808
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	868,000,000	1,029,002,000	1,029,002,000	2,160,000	1,026,842,000	99.79	2,160,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	168,000,000	142,421,000	142,336,403	0	142,336,403	99.94	84,597
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	625,000,000	651,636,000	651,635,160	0	651,635,160	100	840
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,598,884,000	1,361,553,000	1,349,641,000	1,930,100	1,347,710,900	98.98	13,842,100
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	294,000,000	249,640,000	249,485,000	0	249,485,000	99.94	155,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	15,264,212,000	16,752,894,000	16,740,704,092	6,729,387	16,733,974,705	99.89	18,919,295
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	352,893,000	352,892,000	0	352,892,000	100	1,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	6,000	4,662	0	4,662	77.7	1,338
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	20,995,000	20,931,070	0	20,931,070	99.7	63,930
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	3,816,000	3,814,800	0	3,814,800	99.97	1,200
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	31,950,000	31,950,000	0	31,950,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	17,257,000	17,163,540	0	17,163,540	99.46	93,460
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	91,814,000	87,140,000	0	87,140,000	94.91	4,674,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	518,731,000	513,896,072	0	513,896,072	99.07	4,834,928
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	198,905,000	199,940,000	198,335,000	0	198,335,000	99.2	1,605,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	198,905,000	199,940,000	198,335,000	0	198,335,000	99.2	1,605,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	15,463,117,000	17,471,565,000	17,452,935,164	6,729,387	17,446,205,777	99.85	25,359,223
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,613,568,000	1,629,483,000	1,629,157,644	0	1,629,157,644	99.98	325,356
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	210,000	205,000	0	205,000	97.62	5,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	97,872,000	104,640,000	104,640,000	0	104,640,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	22,800,000	19,647,000	19,646,000	0	19,646,000	99.99	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,746,240,000	1,753,980,000	1,753,648,644	0	1,753,648,644	99.98	331,356
5212	Belanja Barang Non Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 409181
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
DI YOGYAKARTA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 17/02/25 8:02 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 15/2/25 3:53 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	569,545,000	657,166,000	636,389,126	0	636,389,126	96.84	20,776,874
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	117,200,000	142,250,000	141,450,000	0	141,450,000	99.44	800,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	101,000,000	421,379,000	421,379,000	0	421,379,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	787,745,000	1,220,795,000	1,199,218,126	0	1,199,218,126	98.23	21,576,874
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	173,500,000	111,612,000	111,588,520	0	111,588,520	99.98	23,480
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	173,500,000	111,612,000	111,588,520	0	111,588,520	99.98	23,480
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	480,000,000	457,638,000	457,635,324	0	457,635,324	100	2,676
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	9,408,000	9,370,562	0	9,370,562	99.6	37,438
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,200,000	4,200,000	4,140,000	0	4,140,000	98.57	60,000
522141	Belanja Sewa	1,031,950,000	1,821,745,000	1,803,542,000	0	1,803,542,000	99	18,203,000
522151	Belanja Jasa Profesi	97,200,000	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,625,350,000	2,307,391,000	2,289,087,886	0	2,289,087,886	99.21	18,303,114
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	487,506,000	478,754,000	478,519,361	0	478,519,361	99.95	234,639
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	50,000,000	150,663,000	150,656,415	0	150,656,415	100	6,585
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	857,138,000	773,536,000	773,325,504	0	773,325,504	99.97	210,496
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,394,644,000	1,402,953,000	1,402,501,280	0	1,402,501,280	99.97	451,720
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,562,480,000	1,938,428,000	1,926,068,294	0	1,926,068,294	99.36	12,359,706
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	199,630,000	127,210,000	125,230,000	0	125,230,000	98.44	1,980,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,762,110,000	2,065,638,000	2,051,298,294	0	2,051,298,294	99.31	14,339,706
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,489,589,000	8,862,369,000	8,807,342,750	0	8,807,342,750	99.38	55,026,250
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	535,000,000	535,000,000	535,000,000	0	535,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	535,000,000	535,000,000	535,000,000	0	535,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	535,000,000	535,000,000	535,000,000	0	535,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	23,487,706,000	26,868,934,000	26,795,277,914	6,729,387	26,788,548,527	99.7	80,385,473

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 409181 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Tgl Data : 17/02/25 12:28 AM
Tgl Cetak : 17/02/25 8:04 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		8,814	61,765,207,000	0	0	0	61,765,207,000
20101	TANAH PERSIL	-	8,814	61,765,207,000	0	0	0	61,765,207,000
132111	Peralatan dan Mesin		1,998	17,682,179,928	(15,424,937,077)	179,731,654	(15,245,205,423)	2,436,974,505
30103	ALAT BANTU	-	2	244,392,500	(267,392,500)	23,000,000	(244,392,500)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	25	3,034,078,500	(2,961,878,500)	(200,000)	(2,962,078,500)	72,000,000
30501	ALAT KANTOR	-	275	2,762,330,391	(2,362,709,857)	(129,630,223)	(2,492,340,080)	269,990,311
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,277	4,936,108,689	(3,945,153,762)	(61,628,579)	(4,006,782,341)	929,326,348
30601	ALAT STUDIO	-	40	528,090,460	(339,349,365)	(34,993,734)	(374,343,099)	153,747,361
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	18	154,419,358	(642,944,045)	564,248,443	(78,695,602)	75,723,756
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	3	37,917,345	(37,917,345)	0	(37,917,345)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	7	13,840,000	(20,906,000)	7,366,000	(13,540,000)	300,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	11	200,450,000	(87,696,876)	(25,056,250)	(112,753,126)	87,696,874
31001	KOMPUTER UNIT	-	222	3,234,354,224	(2,377,618,178)	(187,166,134)	(2,564,784,312)	669,569,912
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	116	2,508,848,461	(2,356,426,899)	24,273,381	(2,332,153,518)	176,694,943
31503	ALAT SAR	-	1	23,500,000	(23,500,000)	0	(23,500,000)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	1	3,850,000	(1,443,750)	(481,250)	(1,925,000)	1,925,000
133111	Gedung dan Bangunan		28	13,517,329,612	(2,282,296,510)	(466,260,079)	(2,748,556,589)	10,768,773,023
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	10	8,788,493,805	(1,459,381,008)	(312,707,322)	(1,772,088,330)	7,016,405,475
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	15	4,487,011,807	(771,751,153)	(145,681,318)	(917,432,471)	3,569,579,336
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	3	241,824,000	(51,164,349)	(7,871,439)	(59,035,788)	182,788,212
135121	Aset Tetap Lainnya		3,495	284,440,580	0	0	0	284,440,580
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	3,481	261,568,080	0	0	0	261,568,080
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	9	9,900,000	0	0	0	9,900,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	5	12,972,500	0	0	0	12,972,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		4	577,951,511	0	(577,951,511)	(577,951,511)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	3	23,800,000	0	(23,800,000)	(23,800,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	554,151,511	0	(554,151,511)	(554,151,511)	0
JUMLAH			14,339	93,827,108,631	(17,707,233,587)	(864,479,936)	(18,571,713,523)	75,255,395,108

Yogyakarta, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 409181 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Tgl Data : 17/02/25 12:28 AM
Tgl Cetak : 17/02/25 8:04 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		109	25,231,934	(24,070,846)	1,348,262	(22,722,584)	2,509,350
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	3	2,925,000	(2,925,000)	0	(2,925,000)	0
30501	ALAT KANTOR	-	2	1,950,000	(1,470,000)	885,000	(585,000)	1,365,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	90	11,200,000	(13,819,000)	2,619,000	(11,200,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	76,000	(76,000)	0	(76,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	2	120,000	(120,000)	0	(120,000)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	3	1,689,934	(1,116,470)	(337,986)	(1,454,456)	235,478
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	8	7,271,000	(4,544,376)	(1,817,752)	(6,362,128)	908,872
JUMLAH			109	25,231,934	(24,070,846)	1,348,262	(22,722,584)	2,509,350

Yogyakarta, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 409181 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Tgl Data : 17/02/25 12:28 AM
Tanggal : 17/02/25 8:05 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker_

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		3	1,732,938,000	(1,719,813,000)	(8,750,000)	(1,728,563,000)	4,375,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	3	1,732,938,000	(1,719,813,000)	(8,750,000)	(1,728,563,000)	4,375,000
JUMLAH			3	1,732,938,000	(1,719,813,000)	(8,750,000)	(1,728,563,000)	4,375,000

Yogyakarta, 17 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Wilayah

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

LAMPIRAN 2

Rekening Koran bulan Desember 2024





Mutasi Transaksi (01/12/2024 - 31/12/2024)

downloaded at 31/12/2024 21:01:51

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)									
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181 (409181)									
Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)									
Rekening Satker : BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 409181 (9890854091811000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-30	09:46:02	091241	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR056 7744 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 20,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
2024-12-30	09:45:33	055936	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR056 7742 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 40,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 20,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-30	09:45:00	038257	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR056 7740 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 60,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 40,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-27	06:41:57	066641	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1DUGMA074 7887 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 80,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 60,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-27	06:40:54	054219	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1DUGMA074 7885 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 100,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 80,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-27	06:40:27	045182	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1DUGMA074 7883 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 120,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 100,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-27	06:40:02	042120	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1DUGMA074 7881 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 140,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 120,000,000	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)									
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181 (409181)									
Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)									
Rekening Satker : BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 409181 (9890854091811000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-27	06:39:34	028770	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1DUGMA074 7879 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 160,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 140,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-24	08:48:28	629340	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 1047 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 180,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 160,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-24	08:47:56	607380	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 1045 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 200,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 180,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-24	08:47:18	587634	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 1043 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 220,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 200,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-24	08:46:45	574311	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 1041 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 240,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 220,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-24	08:46:13	560804	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 1039 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 260,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 240,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-23	20:27:09	193819	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1BUGMR037 4935 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 280,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 260,000,000	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)									
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181 (409181)									
Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)									
Rekening Satker : BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 409181 (9890854091811000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-23	20:26:37	180690	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1BUGMR037 4933 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 300,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 280,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	21:04:14	244987	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1DUGMA074 6896 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 308,000,000	Rp. 8,000,000	-	Rp. 300,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	21:03:31	216705	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1DUGMA074 6893 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 315,000,000	Rp. 7,000,000	-	Rp. 308,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	21:02:59	211103	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1DUGMA074 6891 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 335,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 315,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	21:02:28	185805	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1DUGMA074 6889 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 355,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 335,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-20	21:02:01	179851	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1DUGMA074 6887 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 375,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 355,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	09:21:30	659198	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 9903 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 385,000,000	Rp. 10,000,000	-	Rp. 375,000,000	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)									
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181 (409181)									
Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)									
Rekening Satker : BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 409181 (9890854091811000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-19	09:20:59	642004	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 9901 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 405,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 385,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	09:20:23	621456	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 9899 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 425,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 405,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	09:19:52	596079	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 9897 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 445,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 425,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-19	09:19:21	576145	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 9895 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 465,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 445,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-17	17:58:18	383317	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1BUGMR037 3600 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 485,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 465,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-17	17:57:49	364497	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1BUGMR037 3598 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 505,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 485,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-16	13:24:34	301495	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 9389 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 510,000,000	Rp. 5,000,000	-	Rp. 505,000,000	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)									
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181 (409181)									
Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)									
Rekening Satker : BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 409181 (9890854091811000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-16	13:23:59	279554	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 9387 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 530,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 510,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-16	13:23:28	261120	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 9385 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 550,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 530,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-16	13:22:58	243210	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 9383 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 570,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 550,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-13	14:29:31	574252	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR004 5352 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 580,000,000	Rp. 10,000,000	-	Rp. 570,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-13	14:28:49	547885	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR004 5350 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 600,000,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 580,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-12	12:22:58	292738	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 8616 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 611,760,000	Rp. 11,760,000	-	Rp. 600,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-12	12:22:16	261888	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 8614 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 631,760,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 611,760,000	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)									
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181 (409181)									
Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)									
Rekening Satker : BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 409181 (9890854091811000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-12	12:21:44	245528	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 8612 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 647,385,840	Rp. 15,625,840	-	Rp. 631,760,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-12	12:20:58	212717	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 8610 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 667,385,840	Rp. 20,000,000	-	Rp. 647,385,840	(TELLER)	(Empty)
2024-12-12	09:14:48	062589	TRANSFER DARI 0913980083 240301303026965000001 30130302696500000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 655,625,840	-	Rp. 11,760,000	Rp. 667,385,840	(SPAN)	(Empty)
2024-12-11	10:13:42	747180	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CUGMR017 3450 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 665,625,840	Rp. 10,000,000	-	Rp. 655,625,840	(TELLER)	(Empty)
2024-12-11	10:12:49	709177	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CUGMR017 3448 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 685,625,840	Rp. 20,000,000	-	Rp. 665,625,840	(TELLER)	(Empty)
2024-12-11	09:57:16	068200	TRANSFER DARI 0913980083 240301303026589000001 30130302658900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 650,000,000	-	Rp. 35,625,840	Rp. 685,625,840	(SPAN)	(Empty)
2024-12-10	09:20:55	470879	TRANSFER DARI 0913980083 240301303026462000001 30130302646200000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 642,440,000	-	Rp. 7,560,000	Rp. 650,000,000	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)									
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181 (409181)									
Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)									
Rekening Satker : BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 409181 (9890854091811000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-10	09:07:59	718984	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 8092 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 650,000,000	Rp. 7,560,000	-	Rp. 642,440,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	17:48:01	140687	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1BUGMR037 2134 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 661,270,336	Rp. 11,270,336	-	Rp. 650,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	17:47:22	112264	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1BUGMR037 2132 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 671,270,336	Rp. 10,000,000	-	Rp. 661,270,336	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	17:46:49	091498	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1BUGMR037 2130 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 681,270,336	Rp. 10,000,000	-	Rp. 671,270,336	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	17:46:20	072834	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1BUGMR037 2128 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 701,270,336	Rp. 20,000,000	-	Rp. 681,270,336	(TELLER)	(Empty)
2024-12-09	17:45:51	054633	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1BUGMR037 2126 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 721,270,336	Rp. 20,000,000	-	Rp. 701,270,336	(TELLER)	(Empty)
2024-12-06	14:23:24	658613	TRANSFER DARI 0913980083 240301303026224000001 30130302622400000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 720,852,136	-	Rp. 418,200	Rp. 721,270,336	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)									
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181 (409181)									
Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)									
Rekening Satker : BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 409181 (9890854091811000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-06	14:23:24	658599	TRANSFER DARI 0913980083 240301303026223000001 30130302622300000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 719,825,736	-	Rp. 1,026,400	Rp. 720,852,136	(SPAN)	(Empty)
2024-12-06	14:07:45	758698	TRANSFER DARI 0913980083 240301303025963000001 30130302596300000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 618,555,400	-	Rp. 101,270,336	Rp. 719,825,736	(SPAN)	(Empty)
2024-12-06	13:32:17	012676	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 7247 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 619,581,800	Rp. 1,026,400	-	Rp. 618,555,400	(TELLER)	(Empty)
2024-12-06	13:31:36	778996	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 7245 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 620,000,000	Rp. 418,200	-	Rp. 619,581,800	(TELLER)	(Empty)
2024-12-06	13:30:59	760508	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 7243 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 632,078,300	Rp. 12,078,300	-	Rp. 620,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-06	13:30:18	733802	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 7241 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 652,078,300	Rp. 20,000,000	-	Rp. 632,078,300	(TELLER)	(Empty)
2024-12-06	13:29:41	697873	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 7239 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 672,078,300	Rp. 20,000,000	-	Rp. 652,078,300	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)									
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181 (409181)									
Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)									
Rekening Satker : BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 409181 (9890854091811000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-06	13:29:08	683981	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 7237 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 692,078,300	Rp. 20,000,000	-	Rp. 672,078,300	(TELLER)	(Empty)
2024-12-06	13:28:36	645971	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 7235 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 712,078,300	Rp. 20,000,000	-	Rp. 692,078,300	(TELLER)	(Empty)
2024-12-04	14:37:54	339280	TRANSFER DARI 0913980083 240301303025377000001 30130302537700000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 704,784,300	-	Rp. 7,294,000	Rp. 712,078,300	(SPAN)	(Empty)
2024-12-04	14:37:54	339275	TRANSFER DARI 0913980083 240301303025376000001 30130302537600000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 701,479,300	-	Rp. 3,305,000	Rp. 704,784,300	(SPAN)	(Empty)
2024-12-04	14:37:54	339259	TRANSFER DARI 0913980083 240301303025375000001 30130302537500000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 700,707,900	-	Rp. 771,400	Rp. 701,479,300	(SPAN)	(Empty)
2024-12-04	14:37:27	330562	TRANSFER DARI 0913980083 240301303025412000001 30130302541200000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 694,482,900	-	Rp. 6,225,000	Rp. 700,707,900	(SPAN)	(Empty)
2024-12-04	13:47:05	106291	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CUGMR017 1848 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 714,482,900	Rp. 20,000,000	-	Rp. 694,482,900	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)									
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181 (409181)									
Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)									
Rekening Satker : BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 409181 (9890854091811000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-04	09:24:05	003637	TRANSFER DARI 0913980083 240301303025496000001 30130302549600000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 711,177,900	-	Rp. 3,305,000	Rp. 714,482,900	(SPAN)	(Empty)
2024-12-04	09:24:05	003629	TRANSFER DARI 0913980083 240301303025495000001 30130302549500000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 708,065,400	-	Rp. 3,112,500	Rp. 711,177,900	(SPAN)	(Empty)
2024-12-04	09:24:05	003620	TRANSFER DARI 0913980083 240301303025494000001 30130302549400000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 700,771,400	-	Rp. 7,294,000	Rp. 708,065,400	(SPAN)	(Empty)
2024-12-04	09:24:05	003531	TRANSFER DARI 0913980083 240301303025497000001 30130302549700000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 700,000,000	-	Rp. 771,400	Rp. 700,771,400	(SPAN)	(Empty)
2024-12-03	12:10:58	242842	TRANSFER DARI 0913980083 240301303025341000001 30130302534100000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 20,000,000	-	Rp. 680,000,000	Rp. 700,000,000	(SPAN)	(Empty)
2024-12-03	09:37:58	312533	TRANSFER DARI 0913980083 240301303025129000001 30130302512900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 7,400,000	-	Rp. 12,600,000	Rp. 20,000,000	(SPAN)	(Empty)
2024-12-03	07:58:16	009457	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 6434 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 17,400,000	Rp. 10,000,000	-	Rp. 7,400,000	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (01)									
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA 409181 (409181)									
Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENKUMHAM OPS (913980083)									
Rekening Satker : BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 409181 (9890854091811000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-03	07:57:41	001820	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 6432 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 37,400,000	Rp. 20,000,000	-	Rp. 17,400,000	(TELLER)	(Empty)
2024-12-03	07:57:10	793228	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 502908591 Bpk IBNU VAUYAN 1946812280004345 S1CYGYR058 6430 9890854091811000 BPG 030 KANWIL KEMENKUMHAM DIY 40	Rp. 50,000,000	Rp. 12,600,000	-	Rp. 37,400,000	(TELLER)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 932,339,076	Rp. 882,339,076	Rp. 0		